



## **ARTIKEL PENELITIAN**

# **EKSPLORASI KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA AMBON**

Adriana Sainafat<sup>1\*</sup>, Chendy Pelatta<sup>2</sup>, Yohana Djurumana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Faculty of health, Universitas Kristen Indonesia Maluku

E-mail: [asainafat09@gmail.com](mailto:asainafat09@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Sexual violence against persons with disabilities has shown an increasing trend each year. Studies conducted in 17 low-income countries indicate that persons with disabilities are 3.6 times more likely to experience physical violence and 2.9 times more likely to experience sexual violence compared to individuals without disabilities. This heightened vulnerability is influenced by several factors, including lack of family attention, weak legal protection, social stigma and discrimination, dependence on others, and limited access to reproductive health education and sexual violence prevention. This study aims to explore information related to sexual violence against persons with disabilities from the perspective of the disability community. The research employed a qualitative approach, with informants consisting of school principals, teachers, parents, and students with disabilities. Informants were selected using purposive sampling, while data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal an increase in cases of sexual violence against persons with disabilities in Ambon City, with some cases remaining unreported. Persons with disabilities are vulnerable to both verbal and non-verbal forms of sexual violence. Limited government attention, particularly toward private educational institutions, has resulted in a shortage of educators with specialized competencies in disability education. This condition negatively affects parental knowledge due to limited access to educational resources. These findings indicate that promotive and preventive efforts remain very low. Therefore, a multisectoral approach through the one health community model is needed to protect and prevent sexual violence against persons with disabilities.*

**Keywords:** *Exploration, Sexual Violence, Disabilities, Psychoeducation*

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Studi di 17 negara berpendapatan rendah menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki risiko 3,6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan 2,9 kali lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan individu tanpa disabilitas. Tingginya kerentanan dipengaruhi kurangnya perhatian keluarga, lemahnya perlindungan hukum, stigma dan diskriminasi sosial, ketergantungan pada orang lain, serta minimnya edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi informasi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas melalui perspektif komunitas disabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas. Informan dipilih secara purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kota Ambon, bahkan sebagian kasus tidak dilaporkan. Penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan seksual baik verbal maupun nonverbal. Kurangnya perhatian pemerintah, terutama pada lembaga pendidikan swasta, menyebabkan keterbatasan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus disabilitas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pengetahuan orang tua akibat minimnya akses edukasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya promotif dan preventif masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multisektor melalui model one health community untuk melindungi dan mencegah kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

**Kata kunci: eksplorasi, kekerasan seksual, disabilitas, psikoedukasi**

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan atau manipulasi untuk melakukan tindakan seksual yang dilakukan tanpa izin. Korban kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja yaitu anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua, termasuk penyandang disabilitas. Sedangkan pelakunya bisa orang asing, anggota keluarga ataupun orang yang dipercaya dan ada hubungan darah<sup>1,2</sup>. Masalah kekerasan terhadap penyandang disabilitas terus meningkat tiap tahunnya dan WHO berpendapat bahwa penyandang disabilitas memiliki risiko dua kali mendapatkan kekerasan seksual<sup>3</sup>. Data Komnas perempuan tahun 2023 mencatat ada 105 kasus, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 72 kasus<sup>3</sup>. Sedangkan di provinsi Maluku, kota Ambon menduduki urutan pertama jumlah penyandang disabilitas dari tahun 2017 hingga 2025 saat ini sebanyak 1.592 Penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan. Jumlah kasus tersebut didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pemerkosaan, penganiayaan, hingga pencemaran nama baik<sup>4</sup>. Dari data yang diperoleh kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi dan diperkirakan sebagai fenomena gunung es, artinya kasus yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan kasus yang tidak dilaporkan namun terjadi, sebab bukan perkara yang mudah bagi perempuan penyandang disabilitas untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Hal ini didukung oleh budaya dan sistem hukum seringkali sulit memberikan rasa empati dan rasa keadilan bagi penyandang disabilitas<sup>1,4</sup>. Bentuk – bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan verbal, pencabulan, pemerkosaan, selain itu tindakan merekam ataupun kekerasan online yaitu menyebarkan konten seksual tanpa izin dalam hubungan berpacaran<sup>5</sup> dan kejadian ini juga sering dialami oleh penyandang disabilitas. Untuk itu penyandang disabilitas perlu mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan non disabilitas<sup>1</sup>. Hak penyandang disabilitas mencakup hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi dan pelecehan, sehingga dapat dipastikan bahwa semua fasilitas dan program yang dirancang untuk penyandang disabilitas diawasi secara efektif independensi sebagai mekanisme kolaboratif utama untuk membantu melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan, eksplorasi dan pelecehan<sup>6,7</sup>

Berdasarkan masalah diatas, maka sangat diharapkan suatu pendekatan multi sector yang dapat diimplementasikan dengan baik diperlukan untuk membangun suatu model pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. Masalah penelitian meliputi Bagaimana membangun model

psikoedukasi berbasis one health community sebagai upaya preventif kekerasan seksual penyandang disabilitas.

*One health* merupakan pendekatan kolaboratif multidisiplin dengan goals memecahkan tantangan kesehatan global dan lingkungan. Sejak tahun 2008 one health berfungsi sebagai acuan global untuk semua berita dan informasi Kesehatan<sup>8</sup>. Pada penelitian ini one health community digunakan sebagai suatu pendekatan preventif kekerasan seksual penyandang disabilitas dengan memberikan psikoedukasi reproduksi seksual<sup>9,10</sup>. Jadi pada prinsipnya *one health community* menjadi isu prioritas yang dapat diterapkan pada level kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun baik nasional maupun internasional, mengingat bahwa jenis pendekatan tersebut belum ditelelitih baik dalam skala nasional maupun internasional. Sebab kasus kekerasan seksual merupakan problematika kesehatan masyarakat yang berdampak langsung terhadap pembangunan kesehatan yang dapat mempengaruhi sektor pembangunan lainnya.

Rumusan masalah penelitian yakni, (1) Masalah kesehatan kekerasan penyandang disabilitas mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berisiko 2 kali lipat mendapatkan kekerasan seksual, (2) penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian khusus ataupun kontroling dari berbagai kalangan baik itu keluarga, sekolah ataupun masyarakat (3) penyandang disabilitas kurang atau bahkan tidak mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi tentang seksualitas. Dari gambaran permasalahan tersebut, maka dapat dikatakan persoalan urgensi dan serius, sehingga sangat dibutuhkan pendekatan model psikoedukasi berbasis one health community berupa edukasi atau informasi kesehatan sebagai langkah awal pencegahan masalah tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengeksplorasi isu kekerasan seksual penyandang disabilitas, (2) Kebijakan dan prosedur yang dilakukan di SLB, (3), Pelatihan dan edukasi, (4), Pemahaman orang tua terhadap isu kekerasan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif eksploratif. Pemilihan informan didasarkan pada teknik purposive sampling dengan memilih langsung informan yaitu kepala sekolah, guru, orang tua dan anak penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth Interview, observasi dan dokumen, wawancara mendalam semi terstruktur dengan menggunakan petunjuk wawancara (*interview guide*)<sup>11</sup>, observasi dilapangan untuk melihat fasilitas dan melihat kondisi serta sikap remaja disekolah, studi dokumen terkait struktur organisasi, SOP, panduan atau

laporan kegiatan, tujuan pokok dan fungsi. Penelitian ini dilakukan di SLB pelita kasih poka rumah tiga di kota Ambon.

## **HASIL PENELITIAN**

Dalam wawancara mandalam terdapat 5 tema yang mampu mengeksplorasi informasi kekerasan seksual penyandang disabilitas, dari informasi-informasi tersebut maka dapat menciptaptakan suatu model yang dijadikan sebagai strategi pendekatan preventif kekerasan seksual. Dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemahaman isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah

Isu kekerasan seksual disekolah SLB pelita kasih yang ungkapkan oleh Informan A L sebagai kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

*Saya faham betul isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan isu yang sangat serius, mengingat bahwa penyandang disabilitas rentan karena keterbatasan fisik, intelektual sehingga mengalami keterbatasan dalam komunikasi. Dalam hal ini tanpa mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, seperti ucapan yang bersifat seksual, sentuhan yang tidak pantas seperti tangan menyentuh daerah bokong, payudara, merendahkan sesama teman.*

*Ungkapan salah satu guru*

*Sebagai pengajar, isu kekerasan seksual terhadap disabilitas dianggap tabuh sehingga kurang dibicarakan secara terbuka di lingkungan sekolah, tanpa mereka sadari sesama mereka saling melecehkan satu sama yang lain. bentuk kekerasan seksual yang terjadi yaitu dalam bentuk ucapan tidak etis (makian) saling merendahkan, tatapan tidak senonoh dan bahkan memperlihatkan gamabr atau video pornografi dengan mengajak teman menonton. Seakan sesama mereka menganggap hal ini biasa saja, setelah meminta maaf, maka sudah selesai perkara. Ya seperti itu yang saya ketahui.*

b. Kebijakan dan prosedur

*Sebagai kepala sekolah kami menaruh perhatian lebih terhadap isu kekerasan seksual. Kami menyadari penuh bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam penyampaian apa yang mereka alami, sehingga penting bagi kami untuk memiliki satu kebijakan yang berdampak secara langsung dan maksimal, untuk saat ini kami SLB pelita kasih mengikuti arahan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota ambon serta perda yang berlaku. Sejauh ini juga kami bekerja sama dengan P2TP2A dan yayasan pelita kasih untuk pendampingan psikologi dan hukum apabila ada kasus yang membutuhkan penanganan serius.*

*Prosedur penanganan yang kami terapkan dimulai dari deteksi dini oleh guru, dilihat dari apabila ada perubahan perilaku atau ada hal-hal yang mencurigakan, guru wajib melapor kepada saya*

c. Strategi pengawasan lingkungan sekolah

*Informan WN*“Kami menyadari bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual, karena itu, kami berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik mereka tentang batasan tubuh serta pentingnya melapor, jika merasa tidak nyaman”

*Kami tidak hanya mengajar akademik, tetapi kami juga membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang hak tubuh mereka, bagian mana yang tidak dapat disentuh, namun guru-guru masih terbatas dan belum mengikuti pelatihan-pelatihan yang lebih fokus mngarah ke upaya pengcagahan kekerasan seksual.*

d. Pelatihan dan edukasi

Ungkapan informan : “kami sangat terbantu dengan adanya pelatihan dan edukasi dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Materi tentang psikoedukasi kekerasan sangat penting, karena anak-anak kami perlu mengetahui bagimana melindungi diri dan mengenali tanda-tanda bahaya sebagai upaya pencegahan” (WN, wawancara kegiatan Penlitian, 2025).

*Pihak sekolah belum memiliki pelatihan khusus yang mendalam dari pemerintah, tetapi kami terbuka dan aktif mengikuti kegiatan edukasi dari mitra seperti rumah generasi dan lembaga-lembaga akademik, hal ini menjadi bekal awal bagi guru dan siswa dalam memahami iu kekerasan seksual (WN, Diskusi internal sekolah, 2025).*

e. Pemahaman orang tua terhadap isu kekerasan seksual penyandang disabilitas

Ungkapan informan “saya merasa gagal sebagai orang tua, bila saya tidak tau kalau ada tanda-tanda baru sadar setelah anak agak murung dan takut disetuh”

“kami sebagai orang tua sangat berharap, lingkungan sekolah harus punya aturan khusus untuk melindungi anak-anak disabilitas”

## PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami berbagai keterbatasan, baik fisik, mental, sosial, keterbatasan pengetahuan dan IQ (Intelligence Quotient) yang berdampak secara langsung kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial secara efektif. Keterbatasan tersebut sehingga dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan adanya stigma bahkan diskriminasi pada kalangan disabilitas, sehingga sangat rentan mengalami kekerasan seksual

a. Pemahaman isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah

Isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan persoalan yang sangat serius dan kompleks. Berdasarkan wawancara dengan informan serta temuan dari penelitian, yang dilakukan oleh Maulidya, dkk, 2025, yang mengatakan bahwa,

penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang tinggi karena keterbatasan fisik dan intelektual yang berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan memahami situasi. Dalam banyak kasus, mereka tidak menyadari bahwa telah menjadi korban kekerasan seksual, terutama ketika bentuk kekerasan tersebut berupa ucapan bernuansa seksual, sentuhan fisik yang tidak pantas seperti menyentuh bokong atau payudara, atau perlakuan merendahkan dari orang-orang di sekitar mereka. Isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di lingkungan sekolah masih dianggap sebagai topik yang tabu, sehingga jarang dibahas secara terbuka oleh guru, tenaga pendidik, maupun orang tua. Akibatnya, banyak tindakan pelecehan yang terjadi antar sesama siswa penyandang disabilitas tidak dikenali sebagai bentuk kekerasan. Penelitian dari Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa perempuan disabilitas mengalami beban ganda karena diskriminasi gender dan disabilitas, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Dalam konteks sekolah, minimnya edukasi seksual yang inklusif dan kurangnya pemahaman tentang batasan pribadi menyebabkan perilaku tidak etis seperti makian seksual, tatapan tidak senonoh, dan tindakan merendahkan dianggap sebagai hal biasa<sup>12</sup>.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali berasal dari lingkungan terdekat, seperti teman sebaya, pengasuh, atau bahkan tenaga pendidik. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi antar penyandang disabilitas di sekolah sering kali bersifat verbal dan visual. Informan menyebutkan bahwa tindakan seperti memperlihatkan gambar atau video pornografi kepada teman dan mengajak mereka menonton bersama merupakan bentuk pelecehan yang tidak disadari. Penelitian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa anak dengan disabilitas memiliki risiko 2–4 kali lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak non-disabilitas, terutama pada usia 13–17 tahun. Sayangnya, karena keterbatasan komunikasi dan pemahaman, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hak dan batasan pribadi, sehingga tidak ada pelaporan atau penanganan yang memadai.

Hal ini menimbulkan dilema besar karena korban berada dalam posisi yang sangat tergantung pada pelaku, baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, stigma sosial dan anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki hak seksual atau tidak mungkin menjadi korban turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik antar teman yang melibatkan pelecehan seksual hanya dilakukan dengan permintaan maaf, tanpa ada proses pemulihan atau edukasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa budaya permisif terhadap kekerasan seksual masih

kuat di lingkungan sekolah yang tidak memiliki sistem perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Menurut jurnal Agapedia dari Universitas Pendidikan Indonesia, faktor internal seperti keterbatasan kognitif dan eksternal seperti minimnya pengawasan menjadi penyebab utama tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan seksual yang inklusif, pelatihan bagi guru dan pendamping, serta mekanisme pelaporan yang ramah disabilitas agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang dan dianggap remeh. Shingga upaya pencegahan dan penanganan harus mencakup pendidikan seksual yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, pelatihan bagi pendamping dan tenaga profesional, serta penyediaan layanan pelaporan dan pemulihan yang inklusif dan mudah diakses<sup>13</sup>.

b. Kebijakan dan prosedur

Sebagai kepala sekolah SLB Pelita Kasih, perhatian terhadap isu kekerasan seksual terhadap peserta didik penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Kami menyadari bahwa keterbatasan dalam komunikasi dan pemahaman membuat mereka sulit menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialami. Oleh karena itu, kami menetapkan kebijakan yang berdampak langsung dan maksimal, dengan merujuk pada arahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Ambon serta Peraturan Daerah yang berlaku. Kolaborasi dengan P2TP2A dan Yayasan Pelita Kasih juga menjadi bagian penting dalam menyediakan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban yang membutuhkan penanganan serius.

Prosedur penanganan yang kami terapkan dimulai dari deteksi dini oleh guru, yang dilatih untuk mengenali perubahan perilaku atau tanda-tanda mencurigakan pada peserta didik. Guru wajib melaporkan temuan tersebut kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Langkah ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan memiliki sistem pelaporan dan penanganan kekerasan yang melibatkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Selain itu, SOP penanganan kekerasan seksual yang disusun oleh berbagai lembaga pendidikan dan hukum menekankan pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam mendekripsi dan merespons kasus kekerasan seksual di sekolah

Dalam praktiknya, setelah laporan diterima, sekolah segera melakukan asesmen awal bersama tim pendamping dari yayasan dan P2TP2A. Jika ditemukan indikasi kekerasan seksual, maka korban akan mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum sesuai

kebutuhan. Penanganan dilakukan secara tertutup dan penuh kehati-hatian untuk menjaga privasi dan kenyamanan korban. Menurut jurnal Agapedia dari Universitas Pendidikan Indonesia, kebijakan yang efektif harus mencakup perlindungan khusus bagi anak disabilitas, termasuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan pendampingan yang berkelanjutan. SLB Pelita Kasih berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan ini melalui pelatihan berkala bagi guru dan staf, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas prosedur yang diterapkan<sup>14,21</sup>.

Diharapkan dengan adanya kebijakan dan prosedur yang terstruktur, kami berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik, khususnya mereka yang memiliki disabilitas. Kami juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan. SLB Pelita Kasih akan terus beradaptasi dengan regulasi terbaru dan praktik terbaik agar setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dan tumbuh tanpa rasa takut.

c. Strategi pengawasan lingkungan sekolah

Pernyataan informan WN menegaskan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual karena keterbatasan dalam komunikasi, pemahaman, dan kemampuan melindungi diri. Oleh karena itu, strategi pengawasan di lingkungan sekolah harus dimulai dari penciptaan ruang yang aman dan supportif. Menurut jurnal Agapedia dari Universitas Pendidikan Indonesia, sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga melindungi secara emosional dan fisik, terutama bagi anak disabilitas.

Langkah awal yang dilakukan oleh sekolah adalah memberikan edukasi tentang hak tubuh, yaitu bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta pentingnya melapor jika merasa tidak nyaman. Edukasi ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan kognitif anak. Artikel dari Krajan.id menekankan bahwa pendidikan reproduksi dan pemahaman tentang batasan tubuh harus menjadi bagian dari kurikulum inklusif untuk anak disabilitas. Strategi ini bertujuan agar anak mampu mengenali situasi berisiko dan memiliki keberanian untuk menyampaikan pengalaman mereka kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam hal kapasitas tenaga pendidik. Informan menyebutkan bahwa guru-guru belum sepenuhnya mengikuti pelatihan yang fokus pada pencegahan kekerasan seksual. Padahal, menurut laporan Disdik DKI Jakarta,

pelatihan guru adalah salah satu dari lima langkah strategis dalam mencegah pelecehan seksual di sekolah. Guru perlu dibekali dengan keterampilan untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan, melakukan pendekatan yang sensitif terhadap anak disabilitas, dan memahami prosedur pelaporan yang sesuai.

Strategi pengawasan juga mencakup penguatan sistem pelaporan internal di sekolah. Guru yang melihat perubahan perilaku atau tanda mencurigakan wajib melaporkan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Kolaborasi dengan lembaga seperti P2TP2A dan dinas terkait sangat penting dalam penanganan kasus. Menurut jurnal Agapedia, pengawasan yang efektif harus melibatkan semua pihak—guru, orang tua, tenaga medis, dan psikolog—dalam satu sistem perlindungan yang terintegrasi. Akhirnya, strategi pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Sekolah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan perlindungan anak, memperbarui materi edukasi seksual yang inklusif, dan memperluas pelatihan bagi seluruh staf. Dengan pendekatan holistik ini, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang benar-benar aman bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut.

#### d. Pelatihan dan edukasi

Pelatihan dan edukasi tentang kekerasan seksual bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan langkah krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Ungkapan informan WN menekankan pentingnya materi psikoedukasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga peduli anak disabilitas. Materi ini membantu anak memahami hak atas tubuh mereka, mengenali tanda-tanda bahaya, serta mengetahui cara melindungi diri. Penelitian oleh Sari et al. (2021) dalam *Jurnal Kesehatan Reproduksi* menunjukkan bahwa psikoedukasi yang disesuaikan dengan kapasitas kognitif anak disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan seksual. Meskipun belum ada pelatihan mendalam dari pemerintah, sekolah tetap aktif mengikuti kegiatan edukasi dari mitra seperti Rumah Generasi dan lembaga akademik<sup>16</sup>. Kegiatan ini menjadi bekal awal bagi guru dan siswa dalam memahami isu kekerasan seksual. Studi oleh Lestari & Wibowo (2020) dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling* menegaskan bahwa pelatihan guru secara berkala sangat penting untuk membekali mereka dengan keterampilan deteksi dini dan pendekatan yang sensitif terhadap anak disabilitas. Tanpa pelatihan yang memadai, guru berisiko melewatkkan tanda-tanda kekerasan atau bahkan tidak mampu memberikan respons yang tepat<sup>17</sup>.

Pelatihan yang efektif tidak hanya menyangkut guru, tetapi juga melibatkan orang tua dan tenaga pendamping. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang menyeluruh. Menurut Jurnal Pendidikan Khusus (2022), pelatihan berbasis komunitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan terbukti lebih efektif dalam membentuk kesadaran kolektif dan memperkuat sistem pelaporan kekerasan seksual. Dengan pendekatan ini, anak-anak disabilitas tidak hanya mendapatkan perlindungan di sekolah, tetapi juga di rumah dan lingkungan sosial mereka. Selain pelatihan teknis, pendekatan edukatif yang berbasis nilai dan empati juga penting untuk membentuk budaya sekolah yang peduli dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Materi edukasi harus disampaikan dengan metode yang sesuai, seperti penggunaan gambar, simulasi, atau permainan interaktif, agar mudah dipahami oleh anak-anak dengan berbagai jenis disabilitas. Penelitian oleh Hidayati et al. (2023) dalam Jurnal Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus menunjukkan bahwa metode pembelajaran visual dan praktik langsung lebih efektif dalam membangun pemahaman anak disabilitas tentang batasan tubuh dan situasi berisiko. Dengan terus memperluas akses terhadap pelatihan dan edukasi, sekolah dapat memperkuat kapasitas internal dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Meskipun dukungan dari pemerintah masih terbatas, inisiatif dari lembaga mitra dan akademisi telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran dan keterampilan dasar bagi guru dan siswa. SLB dan sekolah inklusif perlu terus menjalin kemitraan strategis agar pelatihan ini menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan insidental.<sup>18</sup>

e. Peranan orang Tua

Ungkapan informan mencerminkan perasaan bersalah dan ketidakberdayaan yang sering dialami oleh orang tua anak disabilitas ketika menyadari bahwa anak mereka mungkin telah mengalami kekerasan seksual. Perubahan perilaku seperti menjadi murung, takut disentuh, atau menarik diri secara sosial sering kali menjadi satu-satunya petunjuk yang bisa diamati. Namun, karena keterbatasan komunikasi anak disabilitas, tanda-tanda ini kerap terlambat disadari. Penelitian oleh Sari et al. (2021) dalam Jurnal Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa orang tua anak disabilitas sering tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, sehingga penting adanya edukasi yang berkelanjutan bagi keluarga<sup>19,21</sup>.

Kekhawatiran orang tua terhadap minimnya perlindungan di lingkungan sekolah juga sangat beralasan. Sekolah sebagai ruang kedua setelah rumah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem perlindungan anak, terutama bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Informan menekankan pentingnya aturan khusus di sekolah

untuk melindungi anak-anak disabilitas. Hal ini sejalan dengan temuan dalam Jurnal Pendidikan Khusus (2022) yang menyatakan bahwa sekolah inklusif dan SLB harus memiliki kebijakan perlindungan anak yang spesifik, termasuk prosedur pelaporan kekerasan yang mudah diakses dan pelatihan guru dalam mendeteksi serta menangani kasus kekerasan seksual. Sayangnya, banyak sekolah belum memiliki sistem perlindungan yang memadai. Kurangnya pelatihan guru, minimnya tenaga pendamping profesional, serta tidak adanya kurikulum pendidikan seksual yang inklusif menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak menjadi sangat penting. Studi oleh Lestari & Wibowo (2020) dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling menunjukkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam program pencegahan kekerasan seksual di sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan mempercepat deteksi dini terhadap kasus yang terjadi.<sup>22</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, sekolah perlu menyusun kebijakan perlindungan anak yang mencakup pelatihan guru, edukasi seksual yang disesuaikan dengan kebutuhan anak disabilitas, serta mekanisme pelaporan yang ramah dan aman. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam proses ini melalui forum komunikasi rutin dan pelatihan bersama. Dengan pendekatan kolaboratif ini, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi anak-anak disabilitas untuk tumbuh dan belajar tanpa rasa takut.

## **KESIMPULAN**

Tingkat kekerasan seksual pada penyandang disabilitas mengalami peningkatan tiap tahunnya, karena lemahnya perhatian dan pelayanan khusus dari pemerintah dilingkup sekolah, kurang adanya edukasi kesehatan reproduksi karena masih dianggap tabu bila secara terbuka informasi diberikan, sehingga orang tua tidak memberikan edukasi kespro terhadap anaknya, dan juga pelecehan dan kekerasan seksual terjadi dilingkup sekolah sesama teman sebaya disabilitas, dan juga orang-orang terdekat, stigma dan diskriminasi dialami bagi penyandang disabilitas.

## **SARAN**

Penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan seksualitas Untuk itu perlu adanya pelatihan formal dan perhatian penuh pemerintah terhadap isu dan program preventif kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas untuk lebih protektif dalam memberikan edukasi kesehatan kekerasan seksual dan lebih memperhatikan hak-hak pelayanan kesehatan serta kebijakan yang berpusat pada disabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. Lembaga penelitian kemdiktisaintek
2. Lembaga penelitian Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Maluku
3. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku
4. Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Maluku
5. Kepala Sekolah SLB Pelita Pelita Kasih

## Referensi

1. Emmanuel Nii-Boye Quarshie. 2025. Sexual violence victimisation among deaf adolescents: A multi-school-based cross-sectional study from Ghana. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936657425000408>.
2. Emily Ledingham MPH. 2025. Sexual Violence Against Women With Disabilities: Experiences With Force and Lifetime Risk. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379722000496>.
3. Data Kekerasan Perempuan <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>
4. Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Kota Ambon. <https://dp3a.malukuprov.go.id/wali-kota-ambon-sebut-kasus- kekerasan-perempuan-dan-anak-menengkat-pada-2025/>
5. A Sainafat.2024. Hubungan Sexting Motivation Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran Remaja Di Kota Ambon. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/22980/22669>.
6. Frida Carlberg Rindestig. 2025. A latent class analysis of technology-facilitated sexual violence: Associations to other victimizations, psychiatric symptoms, and gender. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756322500238#abs0015>.
7. Zarintaj A. 2021. Prevalence of Nonpartner Physical and Sexual Violence Against People With Disabilities. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34419230/>.
8. J'anos Fiala-Butora. 2024. The influence of the convention on the rights of persons with disabilities on the European court of human rights in the area of mental health law: Divergence and unexplored potential. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252724000141>.
9. Donna Leong, dkk. 2024. Building Public Health Workforce Capacity: Longer- Term Effectiveness of a Capacity Building Intervention to Improve Community-Based Public Health Prevention Work. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773065424000865#:~:text=Online%2C%20asynchronous%20interventions%2C%20such%20as%20Public%20Health%20Essentials%2C,come%20with%20a%20cost%2C%20they%20can%20generate%20impacts>.
10. A. Sainafat. Y. Djurumana, dkk. 2023. Psikoedukasi Remaja Di Era Digital. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/22190>.
11. Mulyadi Seto Dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Metod. Rajawali Pers. Depok.
12. AStrID M. 2015. Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25969164/>.
13. Zarintaj A Dkk.2021. Prevalence Of Nonpartner Physical and Sexual Violence Against People With Disabilities. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34419230/>
14. Monika Mitra Dkk. 2011. Sexual Violence Victimization against men with disabilities. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22011420/>
15. Monika Mtra. Dkk. 2016. Prevalence and Characteristics of sexual violence Against Men With Disabilitas. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26474667/>
16. Sari, D. P., et al. (2021). Peran Psikoedukasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2).
17. Lestari, S., & Wibowo, A. (2020). Pelatihan Guru dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

- Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, 6(1).
- 18. Hidayati, N., et al. (2023). Efektivitas Metode Visual dalam Edukasi Seksual Anak Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 5(1).
  - 19. Jurnal Pendidikan Khusus (2022). Pelatihan Berbasis Komunitas untuk Perlindungan Anak Disabilitas.
  - 20. Sari, D. P., et al. (2021). Peran Orang Tua dalam Mendeteksi Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2).
  - 21. Jurnal Pendidikan Khusus (2022). Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah Luar Biasa.
  - 22. Lestari, S., & Wibowo, A. (2020). Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 6(1).